

Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ifrah Juli Dwiyant, Candra Romanda
Program Studi Akuntansi STIE Rahmadiyah - Sekayu
Email : *ifrahjuli@gmail.com, romanda1976@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini tentang penerapan anggaran berbasis kinerja dan kualitas laporan realisasi anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dapat dilihat dari analisis tersebut bagaimana laporan realisasi anggaran yang berkualitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan dari keterangan dari pihak yang berhubungan dengan penelitian dengan menggunakan analisis penerapan anggaran berbasis kinerja.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kualitas Laporan, Realisasi Anggaran.

1. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan perundang-undangan memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah.

Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil dari dibelanjakannya dana publik. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, penerapan anggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahap siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban dan evaluasinya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumberdaya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan realisasi anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas.

Indonesia telah menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagai pengganti dari penganggaran tradisional. Pada penganggaran tradisional, kinerja diukur dari input. Hal ini menimbulkan perilaku pegawai yang selalu menghabiskan anggaran tanpa mepedulikan hasil dan kualitasnya. Dengan digunakannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), anggaran tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran (*input*) tetapi pada hasil kinerja yaitu *output* dan *outcome* anggaran. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diterapkan pemerintah dalam upaya merespon tingginya tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah untuk dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat dan sistematis.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana kualitas laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin?

2. Kajian Pustaka

Anggaran Berbasis Kinerja

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penyusunan anggaran sektor publik. Salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran tersebut yaitu pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Djayasinga (2015:35) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2016:69), anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Menurut Halim dan Iqbal (2012:173), anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan disusunnya anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktivitas (*allocative and productive efficiency*) dari belanja pemerintah.

Menurut Anggraini dan Puranto (2011:103), tujuan dilakukannya penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya.
2. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Merubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan besar dana yang menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dan sejalan dengan kebijakan organisasi.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Anggraini dan Puranto (2011:104), manfaat anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Sebagai pernyataan pembangunan yang dinyatakan pemerintah daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, tuntutan atau aspirasi masyarakat (*public issues*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Kepala Daerah Selaku Manajemen

Sebagai alat manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada rencana yang dibuat.

3. Bagi Aparatur dan Satuan Kerja

Sebagai sarana untuk mendorong setiap satuan kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada rencana yang dibuat.

4. Bagi Stakeholder yang Diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menerangkan kinerja yang telah dilaksanakan.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan dengan memperlihatkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksana aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja mengacu pada proses pengelolaan keuangan daerah dan menurut Anggraini dan Puranto (2011:84), tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi

Tahap paling awal dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi, pada prinsipnya terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan perumusan strategi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban organisasi.
- b. Menilai lingkungan internal organisasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan (*core competence*).
- c. Menilai lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi peluang dan ancaman.
- d. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi.
- e. Perumusan strategi untuk mengelola isu tersebut.

2. Perencanaan Strategi

Untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja, terlebih dahulu harus mempunyai rencana strategi (Renstra). Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arah kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu.

a. Merumuskan visi dan misi organisasi

Visi menyatakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sementara misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

b. Merumuskan tujuan dan sasaran (*goal setting*)

Tujuan strategi memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategi merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, yang merupakan bagian integral dalam proses pencapaian kinerja yang diinginkan.

- c. Merumuskan strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

3. Penyusunan Program

Penyusunan program (*programming*) adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. Program sendiri merupakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi. Organisasi menampung usulan program dari berbagai unit kerja yang ada dan selanjutnya menganalisis untuk menentukan program-program yang sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Penyusunan program meliputi dua kegiatan umum yaitu sebagai berikut :

a. Analisa usulan program baru

Usulan program yang diusulkan oleh semua elemen organisasi akan diuji kelayakannya, beberapa pertimbangan kelayakan suatu usulan program antara lain analisis biaya-manfaat (*benefit-cost analysis*) dan analisis biaya ke efektifitas (*cost-effectiveness analysis*). Analisis biaya manfaat mengidentifikasi apakah biaya yang dikeluarkan untuk implementasi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan manfaat program itu sendiri. Analisis biaya efektifitas mengidentifikasi perbandingan biaya dengan pencapaian tujuan organisasi.

b. Penelaahan program yang sedang berjalan

Penelaahan program yang sedang berjalan adalah *review* secara kontinyu terhadap program yang sedang berjalan untuk menjamin bahwa program-program tersebut masih relevan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi organisasi.

4. Penganggaran

Program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. Secara keseluruhan biaya program tersebut akan diringkas dalam bentuk anggaran. Anggaran sebenarnya merupakan penjabaran secara terperinci atas program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan standar analisis belanja

Standar analisis belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga/SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Membuat tolak ukur kinerja

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran berbasis kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan.

5. Implementasi

Selama tahap implementasi, pemimpin instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian keuangan melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran input dan output dalam sistem akuntansi keuangan.

6. Evaluasi kinerja

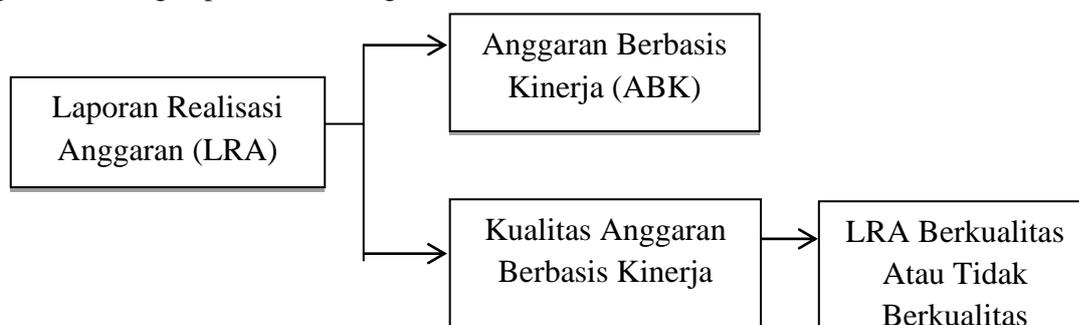
Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, organisasi melakukan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja di lingkungannya berdasarkan saran atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja adalah salah satu alat analisa yang menghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan efektivitas pencapaian saran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Evaluasi kinerja kegiatan meliputi evaluasi efisiensi tingkat kehematan pemanfaatan sumberdaya (*input*) yang dilakukan melalui perbandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumberdaya (*input*) pada setiap jenis kegiatan dan evaluasi efektivitas ketepatan hasil (*output*) dilakukan melalui perbandingan hasil (*output*) dengan target rencana. Hasil evaluasi kinerja akan memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan. Hasil tersebut digunakan sebagai umpanbalik (*feedback*) untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permandagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hubungan anggaran berbasis kinerja dan kualitas laporan realisasi anggaran sangat erat, anggaran berbasis kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dapat membuat kualitas laporan keuangan instansi pemerintah lebih baik sehingga kinerja penyelenggaraan unsur-unsur pemerintah dapat optimal.

Kerangka Pemikiran

Untuk melihat mekanisme dalam penelitian yang direncanakan, berikut Penulis melampirkan gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Penulis menggambar mengenai mekanisme penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan

anggaran berbasis kinerja dan kualitas laporan realisasi anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dapat dilihat dari analisis tersebut bagaimana laporan realisasi anggaran yang berkualitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis mengambil data ini dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Musi Banyuasin (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jln. Kol. Wahid Udin Lk. 1 No. 240 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan waktu penelitiannya adalah selama 3 (tiga) bulan.

Jenis Dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh penulis berupa keadaan umum dan laporan realisasi anggaran dari tahun 2016-2019 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara melakukan wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi, berupa dokumen keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2019. Kemudian melakukan wawancara dan pengamatan pada karyawan yang terkait pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dan menyertakan studi pustaka sebagai pedoman dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Suatu anggaran yang disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksana aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Tahap-tahap penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Strategi

Perencanaan strategi dimulai dari perumusan strategi, terdapat beberapa Langkah dalam melakukan perumusan strategi yaitu sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi Kewajiban-Kewajiban Organisasi

sebelum membuat program/kegiatan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kewajiban organisasi yang harus ditaati agar suatu program/kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai keinginan, seperti aktif dalam melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan organisasi dan mentaati peraturan dalam organisasi.

b. Menilai Lingkungan Internal Organisasi Untuk Mengidentifikasi Apa Yang Menjadi Kekuatan dan Kelemahan.

Tujuan penilaian internal adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal-hal yang dapat di kontrol dan berubah, seperti siapa yang ada di tim kita saat program/kegiatan dan properti yang digunakan saat menjalankan program/kegiatan.

c. Menilai Lingkungan Eksternal Organisasi Untuk Mengidentifikasi Apa Yang Menjadi Peluang dan Ancaman.

Adanya peluang dan ancaman tentu saja akan menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Peluang dan ancaman di lingkungan eksternal yang ada pada BPKAD antara lain yaitu sosial politik, sumber pendanaan dan peristiwa yang terjadi di lingkungan.

d. Mengidentifikasi Isu-Isu Strategi Yang Dihadapi Organisasi.

BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengidentifikasi isu strategi dengan menjawab pertanyaan secara akurat, jujur, faktual dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi

lingkungan organisasi (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

e. Perumusan Strategi Untuk Mengelola Isu.

Tahap terakhir adalah perumusan untuk pengembangan rencana jangka Panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi

2. Perencanaan Strategi

Penentuan Strategi telah diatur dalam Undang-undang Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 15 Ayat 1 dan Pasal 19 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa dokumen penyusunan rencana strategi sangat penting untuk disusun secara sistematis, terukur dan terarah.

a. Merumuskan Visi Dan Misi Organisasi.

Visi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebagai berikut :

1. Tata kelola keuangan adalah manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Unggul adalah dalam hal manajemen keuangan, akuntansi dan teknologi informasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
3. Akuntabel adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan dan jajaran BPKAD kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.
4. Transparan berarti memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat.
5. Partisipatif maksudnya adalah pada aspek perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan dalam penetapan kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya selalu melibatkan masyarakat.

Misi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah serta teknologi informasi.
2. Mengoptimalkan pendapatan daerah.
3. Mendorong terciptanya penganggaran yang transparan dan taat asas.
4. Mewujudkan manajemen keuangan Pemerintah Daerah yang profesional, terbuka dan bertanggungjawab.
5. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan berbasis teknologi informasi.
6. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

b. Merumuskan Tujuan dan Sasaran

Dalam menjalankan kegiatan/program BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tujuan agar kegiatan/program berjalan dengan baik dan kegiatan/program dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sasaran dalam kegiatan/program merupakan pernyataan yang berisi satu harapan yang akan dicapai.

c. Merumuskan Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam merumuskan strategi BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin menentukan misi dan tujuan yang akan dicapai, pengembangan strategi dan penerapan kebijakan agar kegiatan/program berjalan sesuai yang diinginkan.

Hal ini juga sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dimana telah mencantumkan visi dan misinya dalam Laporan Instansi Pemerintah (LKJIP). Visi dan misi tersebut adalah meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan penentuan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang dicantumkan yaitu, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dimana tercapai suatu alokasi anggaran sebesar Rp. 2.849.225.683.981 dan terealisasi Rp. 2.640.255.197.404 pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

3. Penyusunan Program.

Penentuan program dan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun akuntabilitas kinerja suatu badan. Dalam penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas pada tingkat kabinet atau dalam pencapaian visi, misi dan sasaran strategi di suatu badan. Penyusunan program meliputi dua kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Analisa Usulan Program Baru

Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin (2020) bahwa dalam penentuan program dan kegiatan yang harus dilakukan adalah menentukan biaya dan manfaat dalam suatu kegiatan/program, selain itu dalam penentuan program dan kegiatan dicantumkan manfaat apa saja yang akan dihasilkan dalam kegiatan/program yang akan dijalankan.

b. Penelaahan Program Yang Sedang Berjalan.

Agar suatu program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka diberikan ukurankinerja yang akan dicapai kemudian mempertimbangkan dengan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah, agar program/kegiatan masih relevan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi organisasi.

4. Penganggaran

Dengan adanya analisis standar bertujuan meminimalisir kesepakatan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif sehingga dapat melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja untuk mencapai efisiensi anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan standar biaya diperlukan beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim anggaran.

a. Menetapkan Standar Analisis Belanja

Sebelum menjalankan kegiatan/program yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin meminimalisir kesepakatan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif sehingga dapat melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja untuk mencapai efisiensi anggaran dalam satu tahun anggaran.

b. Membuat Tolak Ukur Kinerja

Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin (2020) bahwa dalam menilai kewajaran anggaran biaya suatu kegiatan/program hal *Pertama*, yang dilakukan adalah *review* ulang standar biaya tahun sebelumnya dari SKPD hal ini dilakukan untuk mengetahui standar biaya yang kurang efisien pada tahun tersebut atau mengecek adakah standar biaya yang mencapai target.

Kemudian *Kedua*, adalah beberapa tim anggaran melakukan *survey* pasar yang dimana bertujuan untuk mempermudah dalam penentuan biaya anggaran yang akan digunakan. Selain itu tim anggaran melakukan rapat yang membahas tentang rancangan peraturan standar biaya. Standar biaya disusun sesuai dengan target yang akan dicapai masing-masing indikator.

5. Implementasi

Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin (2020) bahwa dalam implementasi kegiatan dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada peraturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan/program dan implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana yang telah diatur. Implementasi untuk menguji suatu prosedur dalam kebijakan yang disusun dan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan itu sendiri.

6. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, dengan maksud diketahuinya perbedaan tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan. Kinerja dalam suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidak diragukan lagi dalam melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Hal ini dapat dilihat dari LKJIP yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh KABID

anggaran yaitu bapak Sontri, dimana Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yaitu mengaitkan antara pendanaan yang telah dituangkan dalam setiap kegiatan dengan pencapaian keluaran atau hasil yang diharapkan, selain itu juga pencapaian keluaran yang efisien, tidak hanya itu anggaran yang dilaksanakan juga dapat diukur.

Analisis Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dengan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin

Laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu dan kini. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin telah membuat laporan keuangan secara relevan, terlihat dari anggaran belanja dari tahun 2016-2019 anggarannya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan bahwa BPKAD telah memprediksi masa yang akan datang bahwa setiap tahun pasti ada kenaikan harga terutama dalam belanja perlengkapan kantor. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merealisasikan belanja sesuai dengan yang dikeluarkan, terlihat dari tahun 2016-2019 realisasi anggaran belanja lebih rendah dari belanja yang dianggarkan dan laporan keuangan Kabupaten Musi Banyuasin telah disajikan dengan tepat waktu. Upaya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercepat membuahkan hasil, dimana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima penghargaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2017.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, menyajikan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Keuangan BPKAD didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum yaitu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ini berarti bahwa BPKAD telah menyajikan laporan keuangan pemerintah secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dalam laporan realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin telah disajikan laporan tahun sebelumnya untuk menggambarkan adanya perubahan (penambahan dan pengurangan) anggaran sehingga penerapan konsep efisien, efektif dan ekonomis dapat dicapai.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi yang disajikan. Dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan harus dipahami dan dibaca oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin laporan keuangan pemerintah sudah dikatakan berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggarannya dari tahun 2016-2019 telah memenuhi keempat karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

5. Kesimpulan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan baik hal ini dapat dilihat dari LKJIP yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dan pendanaan yang telah dituangkan dalam setiap kegiatan dengan pencapaian keluaran atau hasil yang diharapkan, selain itu juga pencapaian keluaran yang efisien, tidak hanya itu anggaran yang dilaksanakan juga dapat diukur.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin laporan keuangan pemerintah sudah dikatakan berkualitas, hal ini dilihat dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2016-2019 yang telah memenuhi keempat karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka Penulis akan memberikan saran sebagai masukan bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam Meningkatkan kualitas Laporan Realisasi Anggaran (ABK) yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar selalu menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, dengan menjalankan ABK dengan baik dan benar maka akan memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar selalu menyajikan laporan keuangan pemerintah secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka akan memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Yunita dan Puranto, Hendra. 2011. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyuusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Djayasinga, Marselina. 2015. *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad . 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Jogjakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah